ANALISIS KEKERASAN KULTURAL PADA PEREMPUAN TURKI DI ERA PEMERINTAHAN RECEP TAYYIP ERDOĞAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

Rosalina Jamayanti

17323038

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

ANALISIS KEKERASAN KULTURAL PADA PEREMPUAN TURKI DI ERA PEMERINTAHAN RECEP TAYYIP ERDOĞAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Derajat S1 Hubungan Internasional

Disusun oleh:

Rosalina Jamayanti

17323038

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

ANALISIS KEKERASAN KULTURAL PADA PEREMPUAN TURKI DI ERA PEMERINTAHAN RECEP TAYYIP ERDOĞAN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

7 Juni 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji: Tanda Tangan

1. Gustrieni Putri, S.IP., M.A
2. Karina Utami Dewi S.IP.,MA.
3. Hadza Min Fadhli Robby, S.IP.,M.Sc

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rosalina Jamayanti

No. Mahasiswa 17323038

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis Kekerasan Kultural Pada Perempuan Turki di Era Pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karena jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 7 Juni 2021



Rosalina Jamayanti

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin.

Tulisan penelitian ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu

Terima kasih atas segala doa, semangat, perjuangan, pengorbanan, kesabaran, cinta, kasih sayang, dan nasehat yang selalu kalian berikan.

Kakak dan Keluarga Besar

Terima kasih atas doa, dukungan, serta nasehat yang diberikan kepada penulis.

Rekan-rekan HI UII Angkatan 2017

Terima kasih atas segala kebersamaan, dukungan, perjuangan bersama selama menempuh kuliah di HI UII.

HALAMAN MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS. Albaqarah – Ayat 286)

"If you want live a happy life, tie it to a goal, not to people or things"

(Unknown)

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah subhanallahu wa ta'allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad shallalluhu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan dan dukungan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada bagi penulis
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,Ph.D.
3. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Gustrieni Putri, S. IP., M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, serta waktu ditengah kesibukan beliau. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses bimbingan skripsi terjadi kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak di sengaja. Semoga ibu Een selalu diberikan kesehatan, dan kemudahan dalam setiap urusannya.
6. Kepada seluruh dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan banyak pelajaran, tidak hanya ilmu, namun juga banyak hal lain yang penulis dapatkan dari ibu-bapak dosen semua. Semoga ibu dan bapak dosen semua selalu diberikan kesehatan dan semoga Allah membalas semua kebaikan dari ibu dan bapak dosen.

7. Lalu rasa terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua tercinta saya, yang selama ini tidak pernah lupa untuk terus mendoakan dan juga memberikan segala bentuk support kepada saya. Terimakasih untuk segala kasih sayang dan juga sudah percaya bahwa saya bisa menyelesaikan semua ini dengan baik. Tanpa dukungan dan cinta dari kalian saya tidak akan bisa sekuat sekarang.
8. Kepada kakak perempuan saya, Ayu Cahyati. Terimakasih banyak sudah menjadi tempat saya berkeluh kesah dan menjadi sosok kakak yang sangat support apapun yang saya lakukan. Terimakasih banyak sudah membuat saya merasa menjadi sosok yang sangat kaka sayangi sehingga saya tidak merasa sendiri disini.
9. Kepada teman-teman terdekat saya selama masa perkuliahan ini, Kamila teman baik saya sejak pertama kali masuk sampai pada akhir proses perkuliahan ini, yang sangat perhatian dan menjadi sosok ibu kedua bagi saya. Selalu menjadi sosok dewasa tempat saya berkeluh kesah dan selalu dengan sabar mendengarkan cerita saya. Citta, Karin, dan Amal yang menjadi rekan saya dalam dunia *fangirling,* kalian adalah teman berharga saya semenjak awal masuk kuliah sampai pada proses akhir perkuliahan ini. Terimakasih sudah sabar menghadapi saya yang suka usil dan kadang aneh ini. Terima kasih kalian berempat sudah menjadi saksi dan menjadi teman yang sangat support dalam perjalanan saya selama kuliah di HI UII. Semoga kalian selalu diberikan kelancaran dalam setiap hal yang kalian perjuangkan.
10. Kepada ka Kenny dan rekan marah-marah saya, Nadyya. Terimakasih banyak atas bantuan kalian berdua sehingga saya bisa menulis skirpsi ini sampai selesai. Ka Kenny yang selalu memberikan saya motivasi dengan kata-kata bijaknya, dan Nadyya yang sigap membantu saya jika saya kesusahan dalam skripsi saya. Kalian berdua terbaik, saya bersyukur dan bangga bisa mengenal kalian berdua yang humornya aneh dan juga receh.
11. Kepada teman-teman tercintaku anak-anak Happy Puppy (uno gang), ada

Kamil, Ai, Nesia, dan juga Nirmala. Terimaksih sudah mau berjuang bersama sebagai anak bimbingannya bu Een. Saya sudah menyelesaikan jobdes saya untuk menangis dengan baik, tanpa stiker lucu kalian di wa, tanpa jokes-jokes aneh kalian, saya tidak akan menjalani masa penyelesaian skripsi saya dengan sebahagia ini. Terutama momen kita saat di angkringan Lathi akan menjadi momen-momen yang tidak akan saya lupakan. Saya bangga dan sangat bersyukur bisa bertemu dengan teman seperti kalian yang apa adanya dan sangat-sangat support untuk satu sama lain. Semoga kita bisa selalu berteman sampai tua nanti.

12. Dear anak-anak grup Koentji Surga ada Nadyya, Ai, Iit, Awe, dan Nirmala. Terimakasih atas semua lawakan kalian yang receh ya. Semoga kedepannya kita sama-sama berkembang lagi skill ngelawaknya.

13. Tidak lupa untuk teman berhargaku yang bernama Aisyah alias Ai (lagi) yang sudah menjadi rekan dalam segala rekan. Ai menjadi tempat ku berkeluh kesah, fangirling oppa-oppa, rekan satu jokes yang tiap hari chattan tapi cuman ngirim stiker wa aja. Wak, terimakasih ya sudah mau menjadi teman ku dan selalu sigap dan ada ketika aku butuh nasehat mu. Janji kita ke Korea dan Thailand bareng harus kita wujudkan.

14. Yang sudah menjadi support sistem paling ampuh ketika saya sedang pusing dan butuh penyemangat di kala menulis skripsi, Idola -idola saya di Korea dan Thailand. Terutama Kai EXO dan Mew. Karena kalian saya menjadi semangat terus untuk segera bisa menyelesaikan skripsi saya. Dengan menonton kalian rasa pusing, stress dan sedih saya menjadi berkurang. Terimakasih sudah membuat saya termotivasi menjadi seseorang yang lebih baik dan menjadi obat tersendiri bagi saya di masa sulit.

15. Terimakasih kepad teman-teman HI UII angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya disini. Masa-masa perkuliahan di HI UII yang penuh dengan canda tawa dan suka cita akan selalu saya kenang dan rindukan. Semoga kita bisa sukses sama-sama ya kedepannya.

16. Kepada semua teman-teman saya di HI UII, kalian hebat kalian luar biasa

kalau kata ariel noah.

ABSTRAK

Fenomena kekerasan kultural terhadap perempuan di Turki menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas. Kekerasan Kultural terhadap perempuan Turki sudah terjadi mulai sejak masa sekuler pada era pemerintahan Mustafa Kemal Ataturk hingga kini di masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Berasal dari kalangan agamis, Erdogan tidak dapat memberikan perubahan yang besar terhadap kualitas hidup dan hak-hak pada perempuan Turki. Hal ini ditunjukan dengan masih ditemukannya beberapa kebijakan diskriminatif terhadap perempuan yang dilakukan oleh pemerintah. Hak-hak perempuan turun akibat dari aturan nilai-nilai keluarga yang Erdogan tetapkan, hal ini lalu berpengaruh pada kondisi aktivitas ekonomi, fisik dan psikilogi para perempuan Turki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana terjadinya segitiga kekerasan terhadap perempuan Turki di pemerintahan Erdogan menggunakan teori di atas, penelitian ini menemukan bahwa nilai agama merupakan faktor dominan yang mendorong terjadinya kekerasan kultural terhadap perempuan Turki. Selain itu, tingkat patriarki yang tinggi menjelaskan bagaimana kekerasan kultural ini seolah merupakan sebuah siklus yang tidak akan pernah berhenti.

Kata Kunci: Perempuan Turki, Kekerasan Kultural, Segitiga Kekerasan , Recep Tayyip Erdogan.

ABSTRACT

The phenomenon of cultural violence against women in Turkey is something interesting to discuss. Cultural violence against Turkish women hasoccurred since Mustafa Kemal Ataturk's era until now Recep Tayyip Erdogan's era. Comingfromreligiouscircles, Erdogan cannot make a big change to the quality of life and rights of Turkish women. This is shown by the discovery of several discriminatory policies against women carried out by the government. Women's rights have decreased as a result of the rules of family values that Erdogan has set, this then affects the conditions of economic, physical and psychological activities of Turkish women. This study aims to analyze howthe triangle of violence against Turkish women occurs in the Erdogangovernment using the above theory, this study finds that religious values are the dominant factor that drives cultural violence against Turkish women. In addition, the high level of patriarchy explains how this cultural violence seems to be a never-ending cycle.

Keywords: *Turkish Women, Cultural violence, Triangle Violence, Recep Tayyip Erdogan.*

DAFTAR ISI

SKRIPSI ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
HALAMAN MOTTO ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xvii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 3
D. Signifikansi 3
E. Cakupan Penelitian 3
F. Tinjauan Pustaka 4
G. Landasan Teori/Konsep/Model 9
H. Metode Penelitian 13
1. Jenis Penelitian 13
2. Subjek dan Objek Penelitian 14
3. Metode Pengumpulan Data 14
4. Proses Penelitian 14
5. Sistematika Pembahasan 15
BAB II **16**
PERBANDINGAN POSISI PEREMPUAN DARI MASA SEKULER **16**
HINGGA ISLAMISME ERDOĞAN .....
2.1. Posisi Perempuan di Masa Sekuler 16

2.2 Posisi Perempuan Masa Islamisme Erdogan .....
BAB III 24
KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN TURKI PADA ERA RECEP TAYYIP ERDOĞAN 24
3.1. Aspek Agama dalam Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan di Turki 25
3.2 Aspek Ideologi dalam Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan di Turki 27
3.3 Aspek Bahasa dalam Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan di Turki 29
3.2. Analisis Segitiga Kekerasan Pada Perempuan Turki di Era Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan 32
3.3. Hasil Analisis. 39
BAB IV 41
KESIMPULAN DAN SARAN 41
4.1. Kesimpulan 41
4.2. Saran 43
DAFTAR PUSTAKA 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Segitiga Kekerasan Johan Galtung. 10

Gambar 3.1 Statistik kasus femicide setiap tahunnya di masa Erdogan 2010 - 2019
....
34

Gambar 3.2 Tabel hasil analisis 38

DAFTAR SINGKATAN

ICAN : *The International Civil Society Network*

TURKSTAT : *Turkish Statistical Institute*

OECD : *Economic Co-Operation and Development*

WEF : *Web Economic Forum*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan pada umumnya akan dilakukan oleh pihak yang lebih kuat atau lebih berkuasa terhadap pihak yang lebih lemah, walaupun tidak menutup kemungkinan jika akan terjadi hal sebaliknya. Pengalaman akan segala bentuk kekerasan pasti pernah dirasakan oleh sebagian komunitas maupun negara di dunia ini. Berbagai macam bentuk kekerasan dapat terjadi berasarkan berberapa hal seperti, etnis, kelompok maupun gender, atau juga agama. Perempuan adalah salah satu objek yang seringkali menerima perlakuan kekerasan. Hal ini terjadi karena perempuan kerap kali dianggap lemah dan tidak berdaya. Perempuan juga dianggap secara fisik sangat berbeda dengan pria, sehingga menimbulkan anggapan jika perempuan merupakan golongan masyarakat kelas dua.

Di wilayah yang berkonflik, pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan kerap kali terjadi. Kekerasan fisik terhadap perempuan dalam situasi seperti ini umumnya didasarkan karena adanya pandangan tradisional jika perempuan merupakan hak milik (property), dan seringkali dijadikan sebagai objek seksual (Rehatta, 2004). Kekerasan pada dasarnya tidak hanya bersifat fisik saja, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam bentuk non-fisik atau juga kekerasan yang tidak terlihat. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Turki misalnya. Pada masa kepemimpinan Mustafa Kemal Ataturk, terjadinya perubahan kepada semua aspek kehidupan Turki yang sebelumnya merupakan pemerintahan yang berasaskan Islam menjadi pemerintahan yang menganut sistem sekuler (SMITH, 2013). Sistem sekularisme dalam suatu negara yaitu dimana agama dan urusan duniawi tidak bisa digabungkan antara satu sama lain. Terjadinya reformasi budaya di Turki ini

kemudian berdampak pada aspek lain seperti pada peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Turki terutama pada larangan mereka terhadap perempuan dalam menggunakan hijab di ruang publik.

Situasi tersebut lalu berubah ketika Erdogan dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) mucul dan berusaha untuk mencabut aturan pelarangan hijab tersebut. Ada beberapa poin yang Erdogan buat dalam upaya merubah serta revolusi politik sekuler Ataturk, yaitu : Memunculkan Turki yang baru, merubah paradigma sekuler terhadap masyarakat Turki, mengembangkan perekonomian Turki, Penguasaan terhadap militer, Mempertahankan kembali Ideologi Islam sebagai Ideologi mayoritas masyarakat, dan terakhir Turki menuju Uni Eropa (Bahri, 2017). Setelah Erdogan berhasil naik menjadi presiden Turki, dilakukannya perubahan aturan yang berlandaskan pada syariah Islam. Perubahan ini tentunya mempengaruhi kehidupan perempuan di Turki. Aturan awal yang sangat sekuler dengan larangan penggunakan hijab, kini berubah menjadi aturan yang berlandaskan akan syariah Islam dimana perempuan seolah tidak ada yang lebih pantas mereka kerjakan selain menjadi ibu rumah tangga dan bersikap tradisional.

Kehidupan perempuan di Turki era Erdogan ini nyatanya tetap saja memiliki ruang gerak yang terbatas di masyarakat. Padahal sebelumnya banyak pihak yang menduga dengan nainya Reccep Tayip Erdogan sebagai presiden, akan terjadinya peningkatan kualitas hidup yang lebih baik bagi para perempuan Turki. Namun, meskipun seringkali mendapatkan tekanan dan protes domestik, situasi tetap tidak berubah. Pemerintahan Turki seperti tutup mata dengan kebijakan mereka, walaupun masih ada undang-undang yang dibuat untuk melindungi perempuan, namun seringkali tidak dipraktikan dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kekerasan kultural terhadap perempuan di Turki era Recep Tayyip Erdogan?

C. Tujuan Penelitian

Riset ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk kekerasan kultural yang terjadi terhadap perempuan di Turki pada era pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Mengetahui jika kekerasan itu tidak hanya disebabkan oleh kekerasan langsung maupun struktural, namun juga bisa terjadi karena adanya kekerasan kultural.

D. Signifikansi Penelitian

Secara akademis, penelitian ini termasuk ke dalam kategori studi konflik dan perdamaian. Ada tiga bentuk kekerasan, yaitu; kekerasan langsung, kekerasan secara tidak langsung dan kekerasan secara struktural. Di dalam penelitian ini penulis memfokuskan analisis pada bentuk kekerasan kultural yang terjadi terhadap perempuan di Turki.

Hal ini yang membuat penelitian penulis berbeda dengan beberapa penelitian lainnya yang lebih fokus pada pembahasan dalam segi sosial dan budaya, belum ada penelitian yang membahas fenomena kekerasan terhadap perempuan di Turki di era pemerintahan Erdogan menggunakan konsep kekerasan kultural. Penelitian ini penulis rasa penting karena hal ini dapat mempengaruhi ruang gerak seorang perempuan, dan akan semakin memperbanyak pengetahuan tentang isu kekerasan.

E. Cakupan Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian ini adalah terletak pada era Recep Tayyip Erdogan. Era ini dipilih karena saat ini Erdogan masih menjabat sebagai presiden, dan bisa dilihat bagaimana semakin tingginya data kekerasan yang diterima oleh perempuan Turki setiap tahunnya di masa sekarang. Politik islam oleh Tayyip di Turki sudah banyak diteliti dan dibahas oleh orang-orang dari berbagai kalangan yang

mengutarakan opini mereka terkait hal tersebut, ada opini yang mendukung dan ada pula sebaliknya. Salah satu jurnal yang membahas terkait kebijakan Erdogan ini ditulis oleh Magdalen M. Wagner dari University of Colorado yang membuat tulisan berjudul *"The Decline of Women's Right in Turkey: Is it Political Islam or Tayyip?"* dimana dalam jurnal tersebut membahas ketika AKP terpilih, perlindungan terhadap hak perempuan lalu dikesampingkan. Perempuan didorong menuju peran yang lebih tradisional. Analisis dari penulis jurnal menyimpulkan jika politik islam ini digunakan oleh Erdogan untuk mendapatkan kekuasaan otoriter, dan ini sangat mempengaruhi penurunan hak perempuan (Wagner, 2016).

Oleh karena itu penulis ingin menganalisis bagaimana gagasan politik islam oleh Erdogan menimbulkan bentuk kekerasan kultural pada perempuan turki untuk mengikuti gaya hidup yang lebih agamis. Penulis ingin membahas lebih mendalam mengenai bagaimana bentuk kekerasan kultural ini menjadi membatasi hak perempuan. Penelitian penulis juga melihat pada laporan kolektif yang dilakukan oleh UN Women berjudul *Global Database on Violence against Women*, *Global Gender Gap Index Forum, serta Platform We Will Stop Femicide*, karena laporan-laporan tersebut sangat aktual.

F. Tinjauan Pustaka

Recep Tayyip Erdogan mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pada 14 Agustus 2001, dimana partai ini dibangun bersama dengan Abdullah Gul mantan presiden Turki. Posisi Erdogan menjabat sebagai ketua umum partai hingga pada tahun 2014 ia terpilih menjadi presiden pertama Turki yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dalam Jurnal penelitiannya yang berjudul Kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan di Negara Turki, Febriannisa menuliskan jika di bawah kepemimpinannya Erdogan memfokuskan untuk bisa lebih membawa kesejahteraan bagi masyarakat di Turki. Erdogan berambisi jika Turki mampu menunjukkan jika

rezim sekuler yang tertanam dalam dan melekat di Turki bisa menyediakan ruang untuk diskursus keagamaan dan juga HAM bagi semua orang. Erdogan menginginkan langkahnya ini dapat merehabilitasi istilah sekuler di dunia Islam. Melangkah dengan politik islamisme, Erdogan ingin menunjukan jika Turki dengan suara politik islamnya mampu mempertahankan juga pemerintahan sekuler yang selama ini melekat pada Turki dan juga mempertahankan hak-hak konstitusional. Oleh karena itu Erdogan ingin memberikan keyakinan kepada golongan sekuler jika Islam mempunyai tempat di dalam pemerintahan Turki di bawah kepemimpinannya (Febriannisa, 2019).

Recep Tayyip Erdogan merupakan seseorang yang memiliki pribadi agama yang baik. Di dalam kebijakan politiknya Erdogan telah mengembalikan nilai-nilai Islam kembali untuk merespon kebutuhan kehidupan perkotaan Turki sehari-hari, setelah sebelumnya Turki merupakan negara yang fanatik sekularisme. Erdogan meyakini jika dengan kebijakan politik islamnya, Turki dapat mengembalikan kejayaan bangsa dalam berbagai hal. Dalam kepemimpinannya Erdogan mengembalikan kebiasaan lama yaitu mengembalikan pendidikan agama di sekolah-sekolah di Turki, melakukan pencabutan akan aturan larangan jilbab di ruang publik, larangan meminum minuman keras, dll. Pesan Islam yang ia masukan di dalam kebijakan politiknya membuat Erdogan semakin dikagumi oleh masyarakat dan dibenci oleh kaum sekuler ekstrim. Di masa kepemimpinannya sebagai Presiden Turki, Erdogan mendapatkan pandangan sebelah mata oleh pihak sekularisme di Turki. Padahal menurut penulis banyak prestasi yang telah Erdogan lakukan untuk membangun Turki menjadi negara yang lebih baik. Oleh karena itu, dalam jurnal ini penulis ingin mengetahui seperti apa kebijakan politik Erdogan, kelebihan serta kekurangan dari kepemimpinan Erdogan yang mampu membangkitkan kembali Turki menjadi negara yang sehat dan juga mampu diperhitungkan menjadi negara yang bisa

memberikan kontribusi untuk menciptakan adanya perdamaian dengan politik Islamisasinya (Febriannisa, 2019).

Selama masa kekuasaannya, para pimpinan AKP termasuk di dalamnya Erdogan gencar mempromosikan standar Uni Eropa, nilai-nilai universal yang berbasis nilai mencakup hak asasi manusia, kesetaraan kewarganegaraan, kebebasan beragama, demokrasi, dan prinsip pasar bebas. Hal ini dituliskan dalam jurnal yang ditulis oleh Barry yang berjudul *The Decline and Resurgence of Turkish Islamism : The Story of Tayyip Erdogan's AKP*. Dengan menggunakan politik islamisme membuat Erdogan mendapatkan banyak sorotan. Prinsip Islam yang ia gunakan membuat masyarakat percaya jika Erdogan akan membawa Turki menjadi negara yang lebih baik. Namun menurut penulis dalam jurnalnya, baik itu Kemalis dan Islamisme versi Erdogan ini sama-sama tidak benar-benar demokrasi dan hanya menyisakan sedikit ruang untuk perbedaan antara pendapat, agama bahkan politik minoritas. Keduanya sama-sama menggunakan jalan hegemoni meskipun mereka memiliki visi dan misi yang bertolak belakang. Dalam jurnal ini ditekankan mengenai jika Erdogan berusaha untuk menunjukan sebuah *power* yang ia miliki menggunakan prinsip Islamisme untuk menggulingkan secara perlahan jejak Kemalis dalam sistem sekulernya yang masih sangat kuat eksistensinya di Turki (Barry, 2017).

Masuk ke dalam lingkup pembahasan lebih luas terkait Erdogan dan partai AKP, sebagaimana yang dituliskan oleh Negron-Gonzales dalam artikelnya yang berjudul *The Feminist movement during the AKP era in Turkey: Challenges and opportunities*. Telah diketahui jika mereka menggunakan politik Islam pada masa era kepemimpinannya. Erdogan mengungkapkan beberapa poin yang ingin digunakan dalam membangun Turki agar jaya lagi dengan sistem Islamisasinya, yaitu seperti demokrasi dan bebas menentukan pilihan hidup masing-masing individu. Erdogan bertekad akan mengubah sekular yang selama ini menghilangkan unsur islam di Turki menjadi sekuler yang sesuai dengan prinsip islamisasinya. Salah seorang pengamat

menuliskan dalam jurnalnya terkait era kepemimpinan Erdogan dan AKP, dimana pengamat menilai AKP yang menggunakan prinsip Islam untuk keadilan yang lebih demokratis ini ternyata mengesampingkan hak-hak perempuan. Dimana perempuan diminta untuk menjadi lebih "halus" dan lebih "tradisional". Pengamat menggaris bawahi jika sifat patriarki tertanam di dalam pandangan tradisional AKP terhadap gender, khususnya perempuan. Banyak pengamat lain yang beranggapan jika pandangan yang diberikan oleh AKP ini berdampak negatif pada kesetaraan gender di Turki. Hal ini tentunya menjadi sebuah masalah bagi para pro gerakan perempuan di negara tersebut, yang menyebabkan sering terjadinya protes atau bahkan kampanye gerakan pro perempuan yang mereka serukan (Negron-Gonzales, 2016). Dengan adanya anggapan tersebut, Negron-Gonzales berargumen bahwa pandangan yang diberikan aktor dengan prinsip islamismenya ini seperti tidak cocok digunakan untuk semua kalangan terutama golongan pro gerakan perempuan di Turki (Negron-Gonzales, 2016).

Kemudian dalam tulisan lain yang berjudul *The Decline of Women's Rights in Turkey: Is it political Islam or Tayyip?* Oleh Wagner, diceritakan kelompok feminis ini melakukan protes untuk ditanganinya kasus kekerasan rumah tangga, dan menuntut kontrol atas seksualitas mereka. Pengamat mengatakan jika penurunan hak perempuan semakin meningkat di era AKP. Sebelumnya telah diketahui jika hak perempuan pada masa Ataturk juga sangat rendah, terutama bagi perempuan yang tidak diperbolehkan menggunakan jilbab di ruang publik. Namun kini pada masa pemerintahan Erdogan juga semakin menurun dengan dituntunnya perempuan untuk bersikap "tradisional" dan dituntut untuk mengikuti prinsip islamiah nya. Pengamat dalam jurnalnya berfokus meneliti apakah ini benar politic islam atau hanya agenda Erdogan guna menunjukan power terhadap masyarakat Turki yang mayoritas beragama Islam. Karena bagi pengamat prinsip yang ditetapkan Erdogan ini banyak

menimbulkan terjadinya ketidaksetaraan gender terhadap para golongan pro perempuan di Turki (Wagner, 2016).

Disamping itu, seperti yang sudah dituliskan juga oleh Tunçel, Ronay Bakan dan Özlem dalam artikel mereka yang *berjudul From progress to backlash : Turkey's transition from democracy to authoritarianism challenges the feminist movement*. Dimana gerakan hak-hak perempuan sudah berakar dari abad ke-19. Erdogan dan AKP menganut istilah kesetaraan gender di dalam pemerintahannya, namun nyatanya kekerasan seksual di Turki masih tetap ada. Politik Islamisme yang mereka gunakan terlihat menundukan hak-hak perempuan dengan menekankan jika "masyarakat (perempuan) turki tradisional" dan menggunakan nilai-nilai keluarga. Pemerintah mengeluarkan organisasi feminis sekuler dari diskusi resmi dan mengganti LMS tersebut dengan GONGO. Oleh karena itu, menurut pengamat prinsip politik gender seperti ini akan membuat partisipasi angka kerja perempuan semakin rendah (Tunçel, 2019).

Melihat dari tinjauan pustaka tersebut, penulis melihat jika beberapa pengamat mengambil sisi pembahasan terkait bagaimana saat AKP dan Erdogan memimpin Turki masih terjadinya pembatasan hak-hak kepada perempuan Saat Erdogan mengubah sistem sekuler turki menjadi lebih Islamisme seperti yang ia inginkan, hak-hak perempuan masih dibatasi. Pembahasan yang disampaikan pengamat juga cukup luas dimana ada penilaian jika apakah agenda islamisme ini murni untuk perubahan atau hanyalah agenda individu akan kehendak dari Erdogan sendiri. Dengan melihat pola-pola dari referensi di atas, meskipun sudah menyinggung terkait masih terbatasnya hak-hak perempuan, namun belum ada bahasan terkait bagaimana prinsip dan aturan ini bisa menjadi sebuah bentuk kekerasan terhadap seorang perempuan. Kekerasan yang dimaksud penulis adalah dimana kekerasan ini bentuknya tidak terlihat atau merupakan kekerasan kultural yang dilakukan oleh pemerintah akibat dari aturan yang mereka terapkan. Oleh karena ini, penulis berfokus pada bagaimana politik atau agenda islamisme oleh Erdogan ini dapat

membentuk atau membuat terjadinya sebuah kekerasan kultural kepada perempuan Turki yang dibatasi ruang geraknya.

G. Landasan Konsep/Teori/Model

Konsep kekerasan kultural

Di dalam sebuah penelitian maka diperlukannya sebuah landasan konsep, teori maupun model untuk menganalisa permasalahan tersebut. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep yang dicetuskan oleh Johan Galtung, yaitu konsep kekerasan kultural. Sebelumnya, Galtung membagi tiga macam bentuk segitiga kekerasan, yaitu: kekerasan langsung, struktural, dan juga kekerasan kultural. Kekerasan langsung adalah dimana bisa terlihat secara nyata bentuk nya dan demikian pula dengan pelakunya. Kekerasan struktural adalah dimana melukai kebutuhan dasar manusia namun tidak ada pelaku langsung yang bisa diminta tanggung jawabnya. Lalu ada juga kekerasan kultural dimana legitimasi atas kekerasan struktural maupun juga kekerasan langsung secara budaya (Galtung, 1969).

Dalam konsep dari kekerasan kultural oleh Johan Galtung pada tulisannya yang berjudul *Cultural Violence, (Journal of peace Research 1990),* dimana budaya atu kultural dalam hal ini bukanlah entitas atau sistem kultur secara keseluruhan, melainkan hanya aspek-aspek dalam budaya. Aspek simbolis di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan terjadinya kekerasan kultural adalah agama, ideologi, bahasa, seni, ilmu pengetahuan empiris dan ilmu formal. Aspek simbolis ini dapat digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural.

Kekerasan kultural pada dasarnya membuat kekerasan langsung maupun kekerasan struktural menjadi terlihat benar atau menjadi bukan suatu hal yang salah

dalam melakukan kekerasan di lingkungan masyarakat. Menurut Galtung salah satu cara terjadinya sebuah kekerasan kultural ini yaitu dengan mengubah warna atau juga pola dalam sebuah tindakan dari sesuatu yang salah menjadi sesuatu yang benar. Selain itu juga dapat dengan cara yaitu menyamarkan suatu kenyataan sehingga tindak kekerasan atau fakta yang terjadi sebenarnya akan kekerasan menjadi tidak terlihat (Galtung, 1990).

Galtung juga menjelaskan bahwasanya kekerasan kultural ini dapat dipengaruhi dan berhubungan dengan kekerasan lainnya, yaitu kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung sendiri adalah dimana kekerasan tersebut terjadi terhadap fisik, seperti pembunuhan, pemukulan, serta memberikan ancaman terhadap kehidupan seseorang, yang mana hal ini menimbulkan hilangnya kebebasan dan kesejahteraan terhadap korban. Kemudian kekerasan struktural adalah dimana dilakukan oleh aktor yang memiliki kuasa atau otoritas kepada kaum yang lebih lemah di bawahnya. Hal ini biasanya dilakukan oleh institusi atau pemerintahan dalam membuat sebuah peraturan yang menyebabkan terjadinya penurunan hak-hak kepada yang diberikan aturan tersebut. Terdapat empat komponen dalam bagian kekerasan struktural, yakni: penetrasi, segmentasi, marginalisasi dan fragmentasi (Galtung, Cultural Violence, 1990).

Galtung menggambarkan hubungan antara ketiga kekerasan ini menjadi dalam suatu gambar berikut.

SEGITIGA KEKERASAN



Sumber : Segitiga Kekerasan Galtung (www.scribd.com

Dari segitiga kekerasan diatas dapat dilihat jika kekerasan kultural dan juga struktural berada dalam kategori yang tidak terlihat. Sedangkan kekerasan langsung bisa sangat terlihat. Menurut Galtung dalam segitiga kekerasan langsung diartikan sebagai sebuah peristiwa, dan kekerasan struktural diartikan sebagai proses dari pasang surut, serta kekerasan kultural sebagai hal yang tetap maupun juga invarian. Dalam hubungan dari ketiga kekerasan ini, ajaran budaya, nasihat dalam budaya, hasutan serta desakan telah menjadi hal yang tidak terlihat ataupun juga menjadi hal yang sudah biasa untuk dilakukan. Kemudian setelah hal tersebut menjadi semakin memuncak, kekerasan secara langsung pada akhirnya akan hadir sebagai upaya terakhir dari alasan untuk menyelesaikan sebuah masalah (Galtung, Cultural Violence, 1990).

Galtung menjelaskan jika bentuk utama kekerasan budaya yang dilakukan oleh elite yang berkuasa adalah dengan menyalahkan korban kekerasan struktural yang telah memulai masalah terlebih dahulu atau "orang yang pertama kali melempar batu", dan menjadikannya sebagai sosok "penyerang". Siklus ini dalam segitiga kekerasan bisa dimulai dari arah kekerasan manapun. Dalam aplikasi studi di dalam penelitian ini, akar pendorong terjadinya kekerasan kultural bisa dilihat karena faktor agama yang lalu mengakibatkan terjadinya kekerasan struktural dan juga kekerasan langsung pada perempuan Turki.

Untuk melihat bagaimana bentuk dari kekerasan kultural ini bisa terjadi kepada perempuan di Turki, maka penulis mengambil beberapa contoh yang menjadi kategori dari kekerasan kultural menurut Galtung. Pertama adalah agama, di dalam hal ini Galtung menjelaskan jika pada dasarnya ajaran atau juga doktrin agama bisa digunakan untuk hal yang benar maupun juga salah. Di dalam analoginya, hal baik

berasan dari tuhan sedangkan untuk hal salah berasal dari setan. Perlu dipahami jika bahwasanya ketika sebuah doktrin agama diterapkan dalam ajaran yang slah maka hal ini akan menyebabkan terjadinya kekerasan kultural. Begitupu dengan Ideologi, dalam ideologi sebuah negara hal itu dapat di pengaruhi oleh mayoritas ajaran agama di negara tersebut. Galtung menjelaskan jika terkadang negara dipandang sebagai perpanjangan tangan tuhan yang memiliki kendali dalam menciptakan kehidupan (Galtung, Cultural Violence, 1990).

Contoh lain adalah bahasa, di dalam hal ini bahasa dapat menjadi salah satu unsur kekerasan budaya. Hal ini akan terjadi ketika bahsa sendiri digunakan untuk mendiskriminasikan atau berprasangka terhadap kelompok tertentu melalui kata yang diucapkan. Kemudian ada juga seni, yang mana menurut Galtung pada dasarnya seni sendiri dapat menjadi objek kekerasan ketika karya seni tersebut menggambarkan kelompok tertentu dalam konteks yang negatif. Di dalam contoh ilmu foemal, secara garis besar Galtung menjelaskannya dengan berdasarkan pada penarikan kesimpulan secara logis. Contoh terakhir yakni kosmologi, dalam hal ini aspek budaya dicontohkan Galtung dengan dilihat dai asal mula atau akar dari kemunculan hal tersebut. Konsep kosmologi juga dirancang untuk memandang hal yang lebih jauh dari kenyataan serta mentukan apa yang normal dan alami (Galtung, Cultural Violence, 1990).

Oleh karena itu, berdasarkan uraian konsep diatas maka dalam menjawab masalah ini konsep kekerasan kultural dapat secara tepat digunakan untuk menjelaskan bagaimana kondisi yang terjadi terhadap perempuan di Turki masa pemerintahan Erdogan ini. Hal ini sesuai dengan penjelasan Galtung dimana bagaimana sebuah entitas budaya di lingkungan masyarakat itu dapat menjadi hal yang membenarkan tindak kekerasan langsung maupun struktural terhadap perempuan Turki. Beberapa kategori kekerasan diatas juga dapat digunakan untuk

menjelaskan bentuk kekerasan kultural terhadap perempuan Turki di masa pemerintahan Erdogan ini. Seperti politik islamisme yang dilakukan oleh erdogan untuk mengembalikan nilai-nilai keluarga menurut ajaran islam agar perempuan kembali pada kodratnya yang tradisional serta halus sebagai seorang ibu, hal ini masuk kedalam kategori kekerasan kultural melalui doktrin agama. Kemudian memberikan banyaknya pembelajaran terkait hal-hal bebau agamis di sekolah-sekolah, serta pandangan-pandangan islam, karena menurut Erdogan hal ini perlu di lakukan mengingat mayoritas agama masyarakat Turki adalah islam. Hal ini lalu meningkatkan tingginya patriaki serta rasa berkuasa yang tinggi oleh laki-laki di Turki, dalam hal ini termasuk ke dalam kategori ideologi. Lalu ada juga diskriminasi yang Erdogan berikan kepada perempuan-perempuan yang berkerja atau perempuan karier, dimana Erdogan mengatakan jika perempuan yang berkerja dan berkarir adalah *"half persons"* karena lebih mengutamakan pekerjaan dari pada kodratnya yang harusnya menjadi seorang ibu, dalam hal ini akan masuk ke dalam kategori bahasa. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan tiga kategori tersebut karena paling cocok dalam bagaimana mendorong terjadinya kekerasan kultural terhadap perempuan di Turki pada masa Erdogan ini.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis ini akan termasuk ke dalam jenis penelitian yang bersifat metode kualitatif. Dalam Tulisannya, Semiawan mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif sendiri didefinisikan sebagai sebuah metode atau cara yang digunakan untuk mengeksplorasi suatu permasalahan. Penemuan ini didapatkan tidak melalui metode pertanyaan yang terperinci serta pengukuran atau kuantifikasi (Semiawan, 2010).

Lebih lanjut, Wahidmurni juga mengatakan bahwa metode penelitian

Kualitatif juga cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalian dan juga dokumen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jenis penelitian sampai dengan pengecekan keabsahan dari temuan yang dituangkan dalam proposal dan laporan penelitian telah sesuai dengan kaidah kaidah penulisan dalam karya ilmiah yang sudah dipersyaratkan (Wahidmurni, 2017). Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis akan mencoba untuk menganalisis dengan menggunakan penelitian kualitatif berjenis oleh analisis ini.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah bentuk dari kekerasan struktural yang dialami oleh perempuan Turki di masa kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan. Serta faktor apa yang menyebabkan kekerasan kultiral ini terjadi pada perempuan Turki.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data. Penelitian sekunder dilakukan dengan penelusuran dalam tulisan-tulisan ilmiah atau dari artikel maupun dokumen resmi, jurnal serta buku yang berkaitan dengan topik pembahasan sebagai pedoman dasar dalam menentukan teori yang akan digunakan. Oleh karena itu di dalam penelitian ini untuk mendapatkan data akan melakukan studi pustaka dan juga dokumentasi melalui hasil penelitian sebelumnya seperti website, maupun media online resmi. Dari data-data ini kemudian akan diolah dengan menggunakan konsep Kekerasan Struktural yang telah dijelaskan sebelumnya.

4. Proses Penelitian

Proses dari penelitian ini terdiri dari beberapa proses dimana proses pertama dilakukan secara bertahap yang diawali dengan pengumpulan data, kemudian perumusan masalah, menyusun kerangka teori, tujuan penelitian, rancangan penelitian dan pengumpulan data, analisis dan terakhir adalah melaporkan hasil penelitian.

Kemudian tahap selanjutnya bisa dilakukan analisis oleh penulis terkait dengan permasalahan yang didapatkan sehingga bisa memperoleh hasil untuk dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang lebih sistematis, penulis akan menyusun sistematika pembahasan sehingga dapat menunjukan hasil penelitian yang baik dan juga bisa dengan mudah untuk dipahami. Oleh karena itu, penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut.

J.

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan dimana di dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, landasan konsep/teori/model, dan juga metode penelitian yang di dalamnya terdapat jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan proses pengumpulan data.

K.

Bab dua, pada bab ini berisikan data terkait menjawab rumusan msalah yang telah penulis buat.

L.

Bab tiga, menjelaskan tentang analisis terkait isu yang diangkat oleh penulis dan mencari sumber data agar analisis yang ditulis benar adanya berdasarkan data yang telah ditemukan.

Bab empat, berisikan hasil atau kesimpulan yang mencakup inti dari analisis penelitian oleh penulis.

BAB II

PERBANDINGAN POSISI PEREMPUAN DARI MASA SEKULER HINGGA ISLAMISME ERDOĞAN

Pada bab ini penulis akan membagi bagaimana perbandingan peraturan serta kedudukan perempuan di Turki pada masa Sekuler dan pada Erdogan hingga memunculkan proses bagaimana terjadinya bentuk kekerasan kultural pada perempuan Turki. Oleh karena itu di dalam bab ini penulis akan memberikan perbandingan bagaimana posisi dari perempuan di masa sebelum kepemimpinan Erdogan atau dimasa Sekuler Ataturk dan pada masa kini atau masa kepemimpinan Erdogan sebagai seorang presiden.

2.1 Posisi Perempuan di Masa Sekuler

Di tahun 1920an, Mustafa Kemal Ataturk mendirikan Republik sekuler Turki di mana Ataturk memisahkan agama dari urusan kehidupan terutama pada urusan politik. Beberapa peraturan yang dibuat termasuk pada perlindungan hak-hak untuk perempuan seperti pelarangan poligami dan menyediakan hak yang sama dalam perceraian dan hak untuk memilih. Perlindungan hak terhadap perempuan ini diperkuat di dalam skala global di tahun 1990an ketika hak perempuan lalu berada di garis depan pada agenda dunia. Dorongan agar hak perempuan juga dipertimbangkan bersamaan dengan hak asasi manusia. Pada masa itu tingkat pendidikan terhadap perempuan terus meningkat dengan juga tingkat pekerjaan (Arat, 2010).

Selama masa republik Ataturk, Perdana Menteri Ismet Inonu mengatakan jika bangsa Turki menjadi makmur dan meliputi seluruh dunia karena dengan kekuatan dan juga peradabannya hanya ketika para perempuan telah menempati tempat mereka yang adil dan juga bergengsi sama dengan laki-laki dan bekerja bersama laki-laki

dalam tugas-tugas yang rumit dan juga sulit di negara mereka. Hal ini menunjukan jika perempuan juga bisa mengerjakan hal-hal yang dikerjakan oleh laki-laki jika diberikan kesempatan yang sama dan juga adil. Setelah itu, pada tahun 1930an gelombang pertama dari adanya gerakan pro perempuan yang muncul dimana sebagian besar mendapat dukungan oleh Persatuan Wanita Turki. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan yang sangat menonjol termasuk di dalamnya hak bagi perempuan untuk memilih dalam pemilihan kota di tahun 1930 yang lalu diperluas menjadi pemilihan umum pada tahun 1934 (Leake, 2012).

Gerakan perempuan semakin berkembang dan dapat diterima di masyarakat sampai pada tahun 1980an terdapat jeda dalam pergerakan pro perempuan ini. hal ini disebabkan karena terjadinya darurat militer di tahun 1980 dimana menandai adanya kudeta militer ketiga ketika masa pemerintahan oleh Fahri Koruturk sehingga ia disingkirkan dan periode transisi dari kekuasaan dimulai (Timeline, 2012). Di dalam fase ini menjadikan populasi ekstrim yang mana sayap kiri dan kanan lalu ditundukkan yang lalu menciptakan ruang hampa di mana perempuan dapat membicarakan dan menentang masalah apa yang sedang mereka hadapi. Akibat dari kudeta ini, munculah kelompok feminis yang dinamai dengan Kemalis (Timeline, 2012). Ketika Refah berkuasa di tahun 1995, kaum Kemalis ini yakin jika dengan adanya kemunculan Islam dalam politik di Turki bisa mengancam hak-hak bagi perempuan (Arat, From Emancipation to Liberation : Changing Role of Women in Turkeys Public Realm, 2000). Pergerakan kaum gerakan pro perempuan semakin berkelanjutan dimana mereka melakukan protes terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan menuntut kontrol atas seksualitas mereka. lalu undang-undang besar terakhir yang dibuat untuk perlindungan kepada perempuan di Turki disahkan pada tahun 1999 yang mana isi dalam undang-undang tersebut terkait Perlindungan Keluarga. Setelah undang-undang ini disahkan, di tahun 2002 setelah partai AKP

berkuasa di Turki tidak ada lagi undang-undang utama untuk perlindungan perempuan yang di sahkan. Undang-undang yang di sahkan hanya undang-undang terkait kekerasan di dalam rumah tangga, dan undang-undang ini belum di tegakkan dengan baik. Namun perubahan positif lainnya yang terjadi di tahun 2001 adalah dibuatnya amandemen Kode Sipil Turki yang diadopsi dari tahun 1926 dimana mencakup berbagai pembatasan di jalan menuju adanya kesetaraan gender (Wagner, 2016).

2.2 Posisi Perempuan masa Islamisme Erdogan

Recep Tayyip Erdogan merupakan presiden Turki yang ke 12 dimana menjadi presiden pertama yang berhasil menjabat melalui pemilihan umum tahun 2014. Pemilihan umum ini pertama kali dilaksanakan dalam kurun waktu 91 tahun yang mana sebelumnya presiden di Turki dipilih langsung melalui parlemen. Erdogan lahir di dalam tradisi Islam yang sangat kuat, namun menjadi sosok yang Islamis tidak menghalangi dirinya untuk tetap menjadi seseorang yang juga demokrat. Erdogan menyerukan agar kaum muslim Turki untuk berhijrah dari debat ideologis yang ada kepada formulasi kebijakan. Selama masih menjabat menjadi perdana Menteri Turki selama dua periode, Erdogan fokus kepada transformasi ide Universitas Islam dan implementasi yang efektif mengingat bahwa ilmu keagaman dan hal yang berbau agama tidak diperbolehkan di Turki masa sekular masih sangat kental keberadaannya.

Erdogan semenjak kenaikannya menjadi frontman AKP mengkonfirmasi akan niatnya dalam pembaharuan birokrasi dan juga sekolah. Hal ini diarahkan untuk pengembangan apa yang Erdogan sebut dengan generasi religius yang baru. Kebangkitan Islam kembali di Turki perlahan bangkit dengan partai Refah, namun sebagian besarnya pada tahun-tahun di mana Erdogan menjabat menjadi perdana menteri dan akhirnya menjadi presiden di Turki. Keberhasilan AKP dan Erdogan ini sangat bersejarah karena telah diketahui jika sebelumnya semua partai politik agama telah disingkirkan oleh militer. Di tahun 2013 AKP mengeluarkan sebuah undang-

undang yang melarang adanya iklan alkohol serta minuman keras untuk bisnis dalam radius 100 meter dari pemukiman masjid dan sekolah. Selain itu di tahun yang sama yaitu 2013, Erdogan juga mencabut larangan jilbab selama puluhan tahun di Turki dan mengizinkan perempuan untuk bisa kembali menggunakan jilbab di universitas dan gedung-gedung negara. Namun, The International Civil Society Network (ICAN) menyatakan jika bagaimana adanya perbaikan kebijakan bagi perempuan yang bertepatan juga dengan terjadinya penurunan hak-hak pada perempuan. AKP berfokus untuk melindungi keluarga dan tradisi sehingga sering kali terjadinya mengorbankan hak-hak untuk perempuan.

Perempuan dikesampingkan ke dalam peran yang periferal. AKP berpegang teguh pada prinsip tradisi dan juga keluarga dan fokus ini ditegaskan setelah pemilihan umum di tahun 2011 dimana AKP mengubah Kementrian Wanita menjadi Kementerian Keluarga dan Sosial Politik. Fokus dari agenda mereka ini untuk mengembalikan peran tradisional dari seorang perempuan sebagai menjadi istri dan seorang ibu, Erdogan terlihat menggunakan perempuan sebagai instrumen yang menciptakan adanya batas-batas sejarah dan juga budaya untuk memisahkan masyarakat Turki dari masyarakat yang lainnya. Dapat diilustrasikan dengan singkat penjelasan dari Erdogan jika perempuan adalah kepercayaan dari laki-laki atas dari nama Tuhan, dan mengklaim bahwa hal ini menggambarkan pentingnya menjadi seorang ibu untuk mencapai martabat seorang wanita (Gulel, 2020). Erdogan sering kali menggaris bawahi jika menghormati perempuan adalah bagian dari sebuah nilai, tradisi dan juga sejarah Turki, dan menjadi seorang ibu adalah peringkat tertinggi bagi seorang perempuan. Hal ini lantas mendapatkan tanggapan negatif oleh organisasi hak perempuan yang bekerja untuk mempromosikan lebih banyak keterlibatan perempuan di dalam masyarakat. Meskipun ada perluasan kesetaraan gender yang dijanjikan oleh amandemen Kode Sipil Turki, namun amandemen tersebut tetap dikritik karena tidak

sesuai harapan. Hal ini mendapatkan kritik keras karena fakta bahwa Turki sendiri mengalami penurunan dalam Indeks Kesenjangan Gender Global yang diterbitkan oleh Forum Ekonomi Dunia dari posisi 125 ke posisi 130.

Aktivis modern perempuan semakin banyak yang menyuarakan pendapat mereka akan penurunan dari hak-hak perempuan ini. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki pada partner mereka semakin meningkat, tuntutan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan menjadi contoh yang baik untuk anak-anak mereka diberikan kepada seorang perempuan. Selain itu Erdogan juga telah mengambil langkah untuk melarang atau mengekang adanya aborsi serta operasi caesar, hal ini dilakukan karena dalam pandangan Erdogan perempuan harus memiliki anak yang banyak dan memiliki keluarga. Erdogan juga menyatakan jika aborsi sama saja dengan melakukan sebuah pembunuhan dan tidak ada bedanya antara membunuh bayi saat di kandungan serta membunuh bayi setelah lahir. Komentar Erdogan ini lantas memicu protes dari banyak kalangan termasuk diantaranya Pusat Dukungan Hukum untuk Perempuan dan Kolektif Feminis Istanbul yang mengklaim jika larangan aborsi ini akan membuat perempuan menjadi melakukan hal ilegal dengan cara mencari tempat lain untuk melakukan aborsi ini.

Pertentangan lain juga terjadi karena menurut mereka tidak semua perempuan dapat mempertahankan kandungan mereka jika hal ini bersangkutan dengan kesehatan sang ibu. Selain itu Erdogan juga mengesahkan undang-undang terkait peningkatan Islam di dalam politik, larangan akan alkohol, serta pencabutan larangan jilbab di universitas dan ruang publik kepada perempuan muslim yang ingin menggunakan jilbab. Hal ini menimbulkan banyaknya protes yang diajukan oleh para penggerak pro perempuan seperti diadakannya demo di jalan akibat terus menerus terjadinya kekerasan kepada perempuan di Turki yang tidak kunjung selesai. Politik berbasis islam yang Erdogan gunakan bisa menjadi bukan satu-satunya yang

menyebabkan penurunan hak-hak pada perempuan ini terjadi, namun terdapat unsur kekuasaan otoriter yang dibuat oleh Erdogan di turki melalui politik berbasis islam ini untuk menarik populasi konservatif yang sebelumnya dicabut untuk mendapatkan kekuasaan otoriter. Oleh karena itu, tentu saja dalam hal ini akan lebih merugikan hak-hak perempuan daripada masalah politik saja, serta aturan-aturan yang Erdogan buat ini bisa menjadi termasuk ke dalam empat macam bentuk ancaman bagi kebutuhan dasar manusia menurut Galtung, yakni: kebutuhan untuk kelangsungan hidup, kesejahteraan, identitas, dan juga kebebasan.

BAB III

KEKERASAN KULTURAL TERHADAP PEREMPUAN TURKI PADA ERA PEMERINTAHAN RECEP TAYYIP ERDOĞAN

Berbagai bentuk kekerasan kultural terhadap perempuan Turki tidak terjadi begitu saja. Bab ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana bentuk terjadinya kekerasan kultural terhadap perempuan di Turki masa Recep Tayyip Erdoğan. Pembahasan ini akan memberikan pemahaman jika fenomena kekerasan kultural terhadap perempuan itu seolah merupakan sebuah siklus yang tidak akan berhenti terjadi setiap periode pemerintahan. Seperti yang Galtung tulis di dalam bukunya mengenai kekerasan kultural, yang mana kekerasan jenis ini sering kali tidak disadari oleh mereka yang melakukan atau korban dari kekerasan tersebut. Pertama-tama penulis akan membahas bagaimana bentuk kekerasan kultural yang terjadi pada perempuan Turki dimana hal ini berwujud akibat adanya pembedaan antara posisi dari perempuan dan laki-laki dalam pandangan agama oleh Erdogan. Lalu penulis akan menjelaskan bagaimana kekerasan kultural yang terjadi kepada perempuan Turki ini akhirnya mengakibatkan terjadinya kekerasan langsung dan kekerasan struktural kepada para perempuan di Turki. Pada studi kasus yang dibahas, penulis melihat agama, ideologi dan bahasa sebagai bagian dari pendorong terjadinya kekerasan struktural hingga berlanjut menimbulkan terjadinya kekerasan langsung yang diterima oleh perempuan Turki.

3.1 Aspek Agama dalam Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan di Turki

Politik Islamisme yang dilakukan oleh Erdogan untuk meningkatkan nilai-nilai keluarga dari pandangan Islam menuntut agar perempuan kembali kepada kodrat nya pada sosok yang tradisional dan halus sebagai seorang ibu. Hal ini lantas menciptakan terjadinya hal yang dianggap menundukkan hak-hak dari perempuan.

Galtung menjelaskan jika pada dasarnya ajaran atau juga doktrin agama bisa digunakan untuk hal yang benar maupun juga salah. Dengan menggunakan politik islam membuat Erdogan mendapatkan banyak sorotan, awalnya dengan prinsip islam yang Erdogan gunakan membuat Erdogan mendapatkan banyak sorotan karena masyarakat percaya dan berharap jika hal ini akan membawa Turki menjadi negara yang lebih baik. Namun pada kenyataannya, politi islam yang Erdogan bawa tidak benar-benar demokrasi dan hanya menyisakan sedikit ruang untuk perbedaan antara pendapat, agama dan bahkan politik minoritas (Barry, 2017).

Banyak pengamat yang beranggapan jika politik islamisme oleh Erdogan ini berdampak negatif bagi perempuan di Turki, hal ini menyebabkan semakin tingginya sifat patriarki oleh kaum laki-laki dimana mereka menjadi merasa berkuasa dan superior. Oleh karena itu prinsip Islamisme seperti ini sepertinya tidak cocok digunakan untuk semua kalangan karena mengingat di Turki tidak hanya adanya kaum muslim saja, namun ada juga agama lain walaupun minoritas (Gonzales, 2016). Erdogan menyerukan agar kaum muslim di Turki untuk berhijrah dari debat ideologis yang ada kepada formulasi kebijakan yang sekarang ia buat. Bahkan Erdogan sampai mengubah Kementrian Wanita menjadi Kementrian Keluarga dan Sosial Politik, hal ini agar fokus agenda mereka demi mengembalikan perempuan ke perannya menjadi seorang ibu rumah tangga. Erdogan menggunakan perempuan sebagai instrumen untuk menciptakan batas budaya untuk memisahkan masyarakat Turki dari masyarakat yang lainnya. Erdogan selalu menggaris bawahi jika menjadi seorang ibu adalah peringkat tertinggi bagi seorang perempuan di dalam islam, dan penting untuk menjadi seorang ibu karena itu untuk mencapai martabat dari seorang wanita (Gulel, 2020).

Sesuai dengan politik islam dan aturan nilai-nilai keluarga yang ia buat, maka

Erdogan mengambil langkah untuk melarang dan mengekang adanya aborsi serta operasi caesar kepada perempuan di Turki. Hal ini Erdogan lakukan karena dalam pandangannya perempuan harus memiliki banyak anak dan memiliki keluarga, dan Erdogan menyatakan jika melakukan aborsi sama saja dengan melakukan sebuah pembunuhan. Hal ini dalam pandangan Erdogan karena tidak ada perbedaan disaat membunuh bayi di dalam kandungan atau membunuh bayi setelah lahir, dan oleh sebab itu Erdogan menyatakan perempuan alangkah baiknya jika menjalankan kehidupannya menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena menjadi seorang ibu sangat dimuliakan dan dihormati di dalam Islam.

3.2 Aspek Ideologi dalam Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan di Turki

Dalam politik Islamnya, serta upaya untuk mempertahankan dan mengembalikan kembali ideologi islam sebagai ideologi mayoritas masyarakat Turki, Erdogan kemudian membuat aturan untuk dikembalikannya pembelajaran terkait hal-hal agamis ke sekolah-sekolah. Erdogan juga dalam politiknya berupaya untuk turut serta menyebarkan pandangan-pandangan islam dalam setiap mengambil kebijakan atau aturan. Hal ini dilakukan karena mengingat mayoritas masyarakat Turki adalah islam. Namun hal ini pada kenyataannya semakin menguatnya sifat patriarki dan ketimpangan gender di Turki.

Isu gender menjadi salah satu isu hangat yang sedang terjadi di negara Turki, terutama pada masa kepemimpinan Erdogan sebagai Seorang Presiden di Turki saat ini. Mulai dari adanya gender inequality, hingga pada terjadinya kekerasan pada perempuan Turki. Pandangan Islam yang Erdogan berikan memberikan pesan jika perempuan di Turki harus bersikap halus, tradisional dan layaknya seorang ibu. Oleh karena itu kesan maskulin dan lelaki adalah seorang pemimpin begitu ditonjolkan. Banyak ketimpangan gender yang telah terjadi seperti masih adanya gap pay antara laki-laki dan perempuan, pendidikan, hak untuk menyuarakan pendapat. Hal ini

rasanya bertentangan dengan seruan Erdogan dulu yang ingin menciptakan Turki sebagai negara demokratis dan juga mensejahterakan semua masyarakatnya.

Kita bisa melihat pada masa sekuler yang dibangun oleh Mustafa Kemal Ataturk dulu di tahun 1923 an, telah memberikan berbagai hak kepada perempuan. Pada saat itu perempuan memiliki hak untuk memilih dalam semua pemilihan di pertengahan tahun 1930 an. Perempuan diberikan hak yang sama dalam perceraian dan juga hak asuh anak, dan adanya pelarangan poligami. Selain itu tingkat pendidikan seorang perempuan terus meningkat seiring juga dengan meningkatnya pekerjaan. Walaupun sekularisme Ataturk adalah rezim yang sebagian besar menindas dan praktik diktator, namun Turki berhasil berfungsi sebagai pengecualian dan model bagi negara di Timur tengah dalam hak-hak pada perempuan. Masuk ke tahun 2016 dimana hak-hak pada perempuan seperti menurun. Di bawah kepemimpinan Presiden Turki masa ini yaitu Erdogan, kekerasan dalam rumah tangga meningkat dua kali lipat, pekerjaan untuk perempuan menurun dan Erdogan juga membuat pernyataan tentang perempuan tidak bisa disamakan dan dibandingkan dengan laki-laki. Kembali ke tahun 2014 dimana Turki berhasil menduduki peringkat ke 125 dari 140 negara dalam Indek Kesenjangan Gender Global tahun 2014 oleh forum ekonomi dunia dan turun menjadi 130 di tahun 2015 hingga urutan 136 di tahun 2020 (Wagner, 2016).

Di tahun keempat kepemimpinan Erdogan, pengadaan laporan kekerasan di dalam rumah tangga menjadi hal yang ekstrem. Dengan rilisnya laporan ini, Majelis Umum di Turki mengesahkan sebuah UU yang diarahkan untuk mencegah kekerasan terhadap seorang perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka. Dari janji yang dipegang oleh UU tersebut nyatanya ada sekitar 120 kritik yang menyatakan jika UU tersebut belum juga ditegakkan secara memadai, karena kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga belum mengalami penurunan drastis.

Hal ini bisa terjadi akibat juga dari sebuah kediktatoran yang dibuat oleh seorang pemimpin. Seperti yang dikatakan oleh Melik Kaylan, seorang penulis dari Forbes, Newsweek dan Wall Street Journal yang menempatkan Erdogan sebagai orang yang termasuk dalam daftar pemimpin diktator yang modern. Erdogan telah mengesahkan undang-undang terkait dengan peningkatan Islam dalam politik, termasuk larangan akan alkohol, peningkatan pendaftaran ajaran agama di sekolah dan juga pencabutan larangan jilbab kepada perempuan di ruang publik (Wagner, 2016). Banyak sekali kasus kekerasan dan juga ketimpangan gender yang terjadi di era Erdogan mulai dari 2014 sampai pada masa di tahun 2020.

3.3 Aspek Bahasa dalam Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan di Turki

Diskriminasi sering kali Erdogan berikan kepada perempuan-perempuan di Turki yang memutuskan untuk berkerja atau mengerjakan sesuatu yang menurut Erdogan tidak sesuai dengan sifat "ibu". Dalam berita yang dipublish oleh BBC NEWS pada 24 November 2014, Erdogan mengatakan jika perempuan tidak bisa diperlakukan setara dengan laki-laki, Erdogan juga menyebutkan jika para aktivis gerakan pro perempuan menolak menjadi seorang ibu.

> *"Anda tidak bisa menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang sama,"* kata Erdogan dalam sebuah pertemuan di Istanbul. *"Itu bertentangan dengan alam."*

Erdogan mengatakan jika para aktivis pro gerakan perempuan tidak memahami bagaimana pentingnya menjadi seorang ibu di dalam Islam. Komentarnya ini sering kali dianggap usaha untuk menarik pendukung intinya dan membuat ketidaksetujuan dari para pemilih yang lebih liberal. Masyarakat Turki yang memiliki pandangan sekuler berpendapat jika kebijakan sosial pemerintah mereka ini membawa mereka kepada ketidak bebasan dan bahaya. Para perempuan di desak untuk memiliki tiga anak, Erdogan juga mengecam aborsi dan kelahiran melalui operasi caesar. Menurut Erdogan, perempuan tidak bisa melakukan pekerjaan yang

dilakukan oleh laki-laki karena itu bertentangan dengan "sifat halus mereka". Erdogan berpendapat jika perempuan lebih membutuhkan rasa hormat yang sama dari pada kesetaraan. Erdogan juga berkata jika Agama islam sangat menghargai seorang ibu, dan para aktivis pro gerakan perempuan tidak akan mengerti akan hal tersebut karena mereka menolak menjadi ibu (NEWS, 2014).

Jika beberapa negara menganggap jika wanita karier adalah sebagai seorang pelopor dan bagus dalam mendukung perekonomian negara, lain halnya dengan Erdogan yang menganggap hal itu berbeda. Erdogan mengatakan jika wanita karier adalah *"half persons"* karena menurut Erdogan wanita yang pantang melahirkan dan memilih untuk bekerja seperti menyangkal kewanitaannya. Bukan hanya itu, Erdogan juga mengomentari jika perempuan harus menghindari untuk tertawa di depan umum karena dianggap tidak cocok dengan kesan seorang perempuan yang lemah lembut. Pandangan dari dunia konservatif Erdogan ini tentu saja berbenturan dengan minoritas liberal yang masih vokal untuk berpegang teguh pada sistem sekuler Turki yang diturunkan oleh Mustafa Kemal Ataturk (Bruton, 2016). Kini kasus femicide di Turki semakin meningkat, sangat banyak perempuan Turki yang mengalami kekerasan secara fisik dan juga psikologis oleh lawan jenis mereka. Seperti data yang ditunjukan oleh UN WOMEN terkait Violence against Women, pada tahun 2015 saja sebesar 38 persen perempuan di antara usia 15-59 tahun itu mendapatkan intimidasi fisik dan kekerasan sexual oleh partner mereka. Pernikahan anak sebesar 15 persen, peringkat indeks ketidaksetaraan gender 69 persen lalu peringkat indeks kesenjangan gender global berada di peringkat 130 (WOMEN, 2015 - 2016).

Gerakan untuk hak-hak pada perempuan Turki sendiri sudah berakar pada abad ke-19, hal ini dilakukan sejalan dengan tren global untuk memajukan kesetaraan gender Pada masa pemerintahan Erdogan saat ini terlihat jika adanya pandangan

untuk menundukkan hak-hak bagi perempuan dengan terus menekankan istilah "masyarakat tradisional Turki" dan juga nilai-nilai keluarga di dalam rumah tangga. Adanya pandangan sebelah mata tentang gender ini tentunya membuat partisipasi angka kerja perempuan menjadi rendah. Oleh karena itu banyak sekali aksi-aksi demonstrasi oleh perempuan Turki untuk meminta keadilan adanya kesetaraan gender dan menghilangkan kekerasan fisik pada perempuan. Ketika gelombang feminisme mulai muncul, rezim konservatif Turki telah menentang dengan terang-terangan gelombang #MeToo dan juga #TimesUp yang telah mempromosikan ide feminisme di masyarakat mereka terutama untuk perempuan. Perempuan di Turki berjuang untuk dapat bicara tentang kesetaraan gender, pelecehan dan kekerasan seksual yang mereka hadapi, menuntut kesetaraan gender dalam keluarga, akademi, politik hingga tempat untuk bekerja. Organisasi perempuan di Turki terus maju untuk menyuarakan suara mereka, banyak perempuan Turki yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan kerja mereka. Hingga di tahun 2019 pun lebih dari 470 perempuan yang kehilangan nyawanya karena kekerasan di dalam rumah tangga yang terjadi (YaleGlobal, 2019).

3.4 Analisis Segitiga Kekerasan Pada Perempuan Turki di Era Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan

Dari ketiga aspek diatas, agama, ideologi dan bahasa yang merupakan bagian dari kekerasan kultural, maka menjadi akar serta dorongan untuk terjadinya kekerasan struktural dan juga kekerasan langsung terhadap perempuan di Turki. Kekerasan struktural yang terjadi dimana dibuatnya kebijakan-kebijakan oleh Erdogan yang berbasis nilai-nilai keluarga sesuai dengan pandangan Islam yang menuntut agar perempuan besikap halus, memakai pakaian yang sopan dan tertutup, serta menjadi ibu rumah tangga yang taat kepada suami. Dalam hal ini lantas mengakibatkan terjadinya kekerasan langsung atau fisik yang diterima oleh perempuan karena banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan yang terjadi.

Akibat tuntutan dan peraturan-peraturan berbasih agama yang diberikan kepada perempuan agar menjadi wanita yang tradisional dan halus, dimana perempuan seperti digolongkan menjadi masyarakat kelas dua yang lebih baik bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga yang baik. Patriarki menjadi semakin besar dan kuat kedudukannya di Turki, hal ini menimbulkan rasa kuat dan berkuasa oleh laki-laki sehingga menyebabkan marak terjadinya kasus kekerasan kepada perempuan di Turki. Galtung menjelaskan bahwa fisik yang terluka karena terjadinya kekerasan akan membatasi ruang gerak manusia. Hal ini menyebabkan kondisi seseorang menjadi kesulitan dan bahkan tidak mendapatkan distribusi akses-akses kebutuhan manusia karena gerak tubuh yang terbatas (Galtung, Violence, Peace and Research, 1969). Dampak kekerasan fisik dapat ditimbulkan dengan alat-alat maupun juga tanpa alat seperti dengan menggunakan bagian tubuh (Galtung, Violence, Peace and Research, 1969). Hal ini yang terjadi pada perempuan Turki dimana mengalami kasus kekerasan yang disebabkan oleh laki-laki kepada mereka. Isu Femicide menjadi isu yang semakin hangat di Turki, hal ini terjadi karena sudah banyaknya pembunuhan dan juga kekerasan yang ditujukan kepada perempuan. Banyak sekali kelompok hak perempuan Turki yang menyuarakan keras masalah ini dan mengatakan jika hal ini adalah masalah untuk masyarakat luas. Banyak sekali wanita yang mendapatkan pelecehan namun tetap saja masalah yang sudah terjadi sejak dulu ini tidak mendapatkan bantuan yang tepat. Hal ini menyebabkan banyaknya protes yang meminta pemerintah dan pejabat negara untuk harus berbuat lebih banyak pengamanan untuk melindungi keselamatan dan hak perempuan. Pemerintah tidak berbuat banyak untuk pengimplementasian Konvensi Istanbul yang bertujuan untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga dan kesetaraan gender (Timeline, Turkey's long history of femicides, 2020).

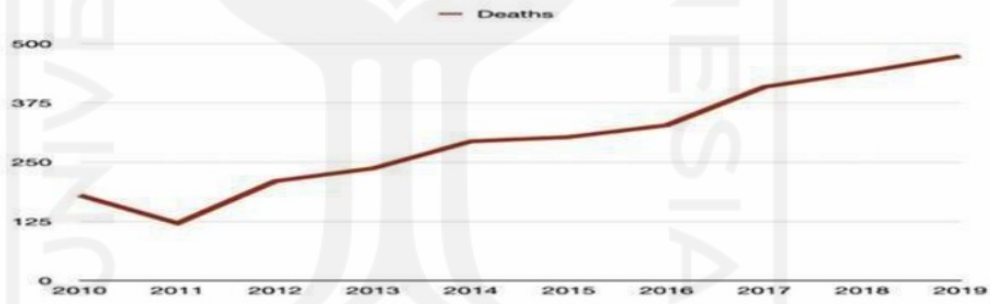
Bahan pada berita baru-baru ini, Turki menarik diri dari konvensi Istanbul

yang melindungi perempuan tersebut. Keputusan Turki keluar dari konvensi Istanbul ini dinilai menjadi kemenangan terbaru bagi para kaum konservatif partai nasionalis Erdogan. Pemerintah Turki meyakini jika konvensi ini hanya akan mengancam keutuhan rumah tangga dan perceraian. Padahal sebelumnya, Erdogan sendiri adalah orang yang menandatangi langsung perjanjian tersebut. Namun pada akhrinya Turki memutuskan untuk keluar dari konvensi Istanbul tersebut, hal ini memperlihatkan jika tidak adanya usaha pemerintahan Turki untuk memperbaiki hak-hak dan memberikan perlindungan pada perempuan.

Balik pada sebuah insiden pernah terjadi di bulan Juni 2017, dimana ada seorang perempuan muda bernama Asena Melisa yang diserang oleh seorang laki-laki di dalam bus di Istanbul karena ia mengenakan celana pendek di bulan ramadhan. Video yang menampilkan kejadian tersebut menunjukan jika laki-laki itu memukulnya sementara si sopir bus hanya diam menonton. Di dalam rekaman video kejadian, si pria berkata "apa kamu tidak malu berpakaian seperti ini di bulan ramadhan?". Di insiden lain, seorang perempuan bernama Canan Kaymakçı dilecehkan di jalan ketika seorang laki-laki menuduhnya mengenakan pakaian yang menggoda dan membuatnya bergairah. Hal yang sama juga terjadi pada perempuan lain bernama Ayşegül Terzi yang disebut setan dan ditendang oleh seorang pria di dalam bus hanya karena ia mengenakan celana pendek. Bahkan laki-laki itu sampai berteriak mati bagi mereka yang memakai celana pendek (Reuters, 2017).

Meskipun protes dan demonstrasi semakin meluas, namun jumlah femisida terus meningkat secara signifikan. Sebuah kelompok hak asasi wanita We Will End Femicide Platform, mengatakan jika ada 2.000 perempuan yang telah dibunuh sejak Februari 2015 yang mana dilakukan oleh suami atau pacar mereka sendiri. Sedangkan pada 2019 sendiri terdapat 474 perempuan dibunuh di Turki. Hal ini menunjukan jika citra maskulinitas sangat kuat dan perlu diubah, namun perubahan itu terjadi sangat lambat karena yang terjadi hanya tidak ada nya kesetaraan gender dan dituntutnya

perempuan untuk bersikap tradisional dan menjadi halus. Orang-orang yang dianggap berada pada oposisi akan dikucilkan, dan pemerintah tidak lagi mengundang aktivis hak perempuan untuk bersama lagi menangani kasus yang penting (Letsch, 2020). Kembali di tahun 2020 terjadi kasus pembunuhan kepada seorang wanita berusia 27 dimana ia dibunuh oleh mantan pacarnya, hingga seorang siswa yang ditemukan di hutan provinsi Muğla Aegean yang diduga dipukuli lalu dicekik sampai mati oleh mantan kekasihnya. Mundur pada tahun 2019 terdapat 474 jumlah perempuan dibunuh dan diperkirakan akan terus meningkat data ini dikumpulkan oleh kelompok We Will Stop Femicide yang memang aktif menyuarakan protes untuk perlindungan kepada kaum perempuan di Turki (2020). Dibawah ini akan di tampilkan data bagaimana kasus femicide semakin meningkat dalam setiap tahunnya di Turki, dan pada masa kepemimpinan Erdogan terlihat jika semakin tingginya kenaikan kasus femicide yang terjadi.



Sumber : We Will Stop Femicide Platform

Bisa dilihat jika bahwasanya kekerasan pada perempuan di Turki semakin meningkat dari tahun ketahunnya di masa Erdogan kini. Beberapa kebijakan yang ia buat seperti adanya larangan aborsi dan juga penekanan terhadap perbandingan antara *role* laki-laki dan perempuan dimana Erdogan mengatakan jika kodratnya perempuan tidak bisa setara dengan laki-laki karena perempuan ditakdirkan menjadi seorang ibu dan mengurus anak-anak serta suaminya di rumah. Hal ini memberikan pandangan jika perempuan dijadikan dan dipandang lebih rendah kedudukannya dari pada sosok

laki-laki. Banyaknya protes yang dilayangkan oleh penggerak pro perempuan di Turki sepertinya tidak terlalu berpengaruh pada kebijakan yang Erdogan buat dan sampaikan. Bahkan Erdogan sendiri melarang dirayakannya Women International Day di Turki dengan dalih jika hari ibu bisa di rayakan setiap hari dengan cara perempuan harus bersikap seperti seorang ibu. Dengan adanya tuntutan pada perempuan untuk lebih halus dan juga tradisional ini justru seperti memberikan ketidak bebasan pada perempuan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.

Menurut Galtung sendiri kebebasan adalah salah satu dari syarat keluarnya dari adanya kekerasan, dan munculnya kekerasan kultural ini seperti menanaman nilai-nilai secara paksa oleh kaum yang lebih berkuasan terhadap kaum yang lebih lemah. Dengan adanya penanaman nilai bahwasanya perempuan harus bersikap halus dan tradisional, ini sama saja dengan membatasi ruang gerak perempuan dan kebebasan mereka untuk menentukan apa yang ingin mereka lakukan di dalam hidup. Disebutkan juga oleh Galtung kembali bahwa salah satu dari empat bentuk ancaman terhadap kebutuhan dasar dari manusia yaitu salah satunya adalah kebebasan, yang mana dalam hal ini sepertinya tidak dirasakan oleh seluruh perempuan yang ada di Turki. Bisa kita lihat jika aborsi menjadi salah satu yang tidak diperbolehkan oleh Erdogan di negara Turki, dimana ia menyebutkan jika seorang perempuan yang melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan. Namun jika kita kembali melihat ke dalam pandangan Galtung mengenai arti kebebasan, hal ini sebenarnya di bebaskan kepada perempuan yang ingin melakukannya. Terutama jika di lihat pada kacamata kesehatan yang mana bisa saja memaksakan untuk perempuan tersebut harus melakukan aborsi demi menyelamatkan nyawanya. Namun dengan adanya aturan tidak diperbolehkannya melakukan aborsi oleh Erdogan menyebabkan adanya kekerasan secara struktural yang merupakan kekerasan secara tidak langsung

yang diterima oleh perempuan tersebut karena tidak bebas dalam melakukan pilihan terhadap dirinya sendiri.

Selain itu kebebasan dalam perempuan menentukan karir atau pilihannya dalam bekerja juga terhalangi dengan adanya pandangan Erdogan jika perempuan itu harus bersifat halus dan tradisional agar ia menunjukan jati dirinya menjadi seorang ibu yang benar. Erdogan bahkan mengatakan jika seorang perempuan yang berkarir itu adalah setengah manusia. Hal ini tentu saja membatasi ruang gerak seorang perempuan untuk menjadi apa yang ia inginkan dan memilih pekerjaan yang ia mau selain hanya menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik. Namun dengan adanya penuturan Erdogan terkait perempuan yang harus memiliki sifat halus menjadi ibu dan juga memakai pakaian sesuai dengan syariah islam menyebabkan tumbuhnya patriarki di Turki menjadi semakin besar dan kuat. Banyaknya terjadi kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga akibat suaminya merasa jika pekerjaan di luar rumah harus dikerjakan oleh seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga, dan bukan tugas dari seorang perempuan untuk melakukan pekerjaan di luar rumah.

Dengan adanya politik berbasis islam oleh Erdogan juga memicu kekerasan langsung pada perempuan yang tidak memakai jilbab atau menggunakan pakaian terbuka. Banyaknya terjadi kasus pemukulan terhadap perempuan karena berjalan jalan dengan pakaian yang dianggap tidak sesuai dengan syariah Islam itu sendiri. Dimulai dari adanya kekerasan kultural ini lalu mengakibatkan terjadinya dampak fisik dan psikologis pada perempuan Turki yang mana akhirnya akan menyebabkan banyak perempuan Turki yang meregang nyawa akibat kasus kekerasan hingga pelecehan seksual yang mereka terima dari laki-laki. Dalam dampak psikologis, Galtung menyebutkan bahwa kekerasan psikologis merupakan bentuk dari kekerasan jiwa yang dapat sangat berpengaruh dalam kehidupan individu, walaupun akan lebih sulit untuk diidentifikasikan. Jika kekerasan fisik secara jelas terlihat dan dapat

membatasi mobilitas individu, maka kekerasan psikologis ini menyerang jiwa setiap indivisu yang kemudian akan mempengaruhi pada rangkaian perilaku. Bentuk-bentuk yang mengancam kesehatan psikologis kemudian akan membahayakan dan melukai mental seorang individu (Galtung, Violence, Peace and Research, 1969). Hal ini yang terjadi pada perempuan Turki akibat dari kebijakan mentradisionalkan kembali Turki yang dibuat oleh Erdogan yang mengalami kekerasan kultural, yaitu dimana para perempuan Turki merasa takut untuk keluar dari rumah mereka saat malam hari atau menggunakan pakaian yang tidak menutup seluruh tubuh. Mereka juga merasa cemas, takut kepada suami, dinamika emosi sebagai dampak yang di terima dari kekerasan yang sering terjadi pada sosok perempuan (dw, 2021). Sifat patriarki yang sudah mengakar sejak dulu terlihat semakin menguat di masa pemerintahan Erdogan, hal ini disebabkan karena adanya politik berbasis agama yang kini di terpakan di Turki sehingga kaum konservatif menggunakan ini sebagai sebuah kemenangan bagi mereka. Perempuan ditampakkan dengan stereotip dan stigma yang buruk dibentuk oleh masyarakat yang melanggengkan nilai-nilai budaya patriaki ini.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan jika agama, ideologi dan bahasa merupakan bentuk pendorong terjadinya kekerasan kultural kepada perempuan di Turki. Hal sesuai dengan aspek-aspek budaya yang dalam konsep kekerasan kultural yang mempengaruhi adanya tindakan kekerasan kultural pada perempuan Turki. Bahkan dalam kasus ini penulis menemukan jika ketiga aspek dalam kekerasan kultural ini juga menjadi akar pendorong dalam menimbulkan kekerasan struktural dan kekerasan langsung pada perempuan di Turki. Hal ini terjadi akibat kuatnya sifat patriarki yang secara tidak langsung tertanam sejak dulu karena adanya *masculinity crisis* dan pandangan jika perempuan itu berada di dalam golongan masyarakat kelas dua. Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan tidak diberikannya ruang luas bagi perempuan untuk menentukan pilihan hidup serta keinginan untuk lebih dari menjadi seorang ibu rumah tangga seperti yang selalu Erdogan ucapkan.

3.5 Hasil Analisis

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dengan menganalisis menggunakan konsep kekerasan struktural dari Galtung, dapat diambil kesimpulan bentuk

kekerasan kultural terhadap perempuan Turki pada masa Erdogan seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Kekerasan Kultural Terhadap Perempuan Turki Pada Era Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan

NO	Bentuk Kekerasan Kultural Pada Perempuan Turki di Era Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan	Isi
1	Aspek agama dalam kekerasan kultural terhadap perempuan di Turki	• Politik islamisme oleh Erdogan untuk mengembalikan nilai-nilai islam menuntut perempuan kembali kepada kodrat nya sebagai seorang ibu.
2	Aspek ideologi dalam kekerasan kultural terhadap perempuan di Turki	• Erdogan dalam upaya mengembalikan ideologi islam lagi di Turki membuat aturan-aturan berbasis agama yang menyebabkan terjadinya ketidak setaraan gender di Turki yang membuat adanya penurunan hak-hak pada perempuan.
3	Aspek bahasa dalam kekerasan kultural terhadap perempuan di Turki	• Erdogan mengatakan jika di dalam agama islam perempuan tidak sertara

		dengan laki-laki. Perempuan harus bersikap halus dan tradisional. Berbeda dengan laki-laki yang harus memimpin.
4	Analisis segitiga kekerasan pada perempuan Turki di Era Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan	• Tiga aspek sebelumnya yang merupakan bagian dari kekerasan kultural menjadi akar pendorong terjadinya kekerasan struktural dan kekerasan langsung terhadap perempuan Turki.

Diawali dengan table point pertama, dimana Erdogan berusaha untuk mengembalikan lagi nilai-nilai islam ke dalam Turki. Erdogan membuat aturan nilai-nilai keluarga yang berfokus untuk mengembalikan peran perempuan sebagai seorang ibu, tidak berkerja dan tuntutan agar memiliki banyak anak menjadi satu hal yang harus di lakukan oleh perempuan. Pada table selanjutnya yaitu nomor 2, penulis menyebutkan bahwa aturan-aturan untuk mengembalikan ideologi ini lantas membuat terjadinya ketidak setaraan gender di Turki sangat tinggi. Sifat patriarki semakin kuat dimana laki-laki menjadi merasa superior dan berkuasa di atas perempuan, hal ini terjadi karena Erdogan sendiri sangat tidak mendukung adanya kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan karena hal itu menentang hukum alam dan menentang kodrat perempuan yang harusnya hanya menjadi seorang ibu. Pada hasil nomor 3, hadirnya ucapan serta gagasan Erdogan dalam menyatakan jika perempuan dan laki-laki tidak setara semakin memperkuat terjadinya kekerasan

kultural terhadap perempuan Turki. Perempuan yang berkerja dianggap setengah manusia karena menentang kodrat nya yang harusnya menjadi seorang ibu, perempuan karir dalam pandangan Erdogan sama saja dengan tidak mau memiliki anak maupun berumah tangga. Erdogan dalam upaya mentradisionalkan lagi Turki dengan cara politik islamisasinya menyebabkan perempuan berada dalam masyarakat kelas dua. Erdogan mengaris bawahi jika tugas seorang perempuan di dalam islam adalah menjadi seorang ibu dan menjadi wanita karir bukan lah sesuatu yang tepat dan tidak sesuai dengan kodrat sesungguhnya seorang perempuan.

Pada hasil nomor 4, penulis menyebutkan bahwa adanya ketiga aspek di dalam kekerasan kultural tersebut menjadi akar pendorong dan memicu terjadinya kekerasan struktural dan langsung kepada perempuan Turki. Hal ini bisa terjadi karena semakin kuatnya tingkat patriarki yang terjadi di Turki, para laki-laki merasa lebih hebat daripada perempuan hingga sering kali terjadinya pemukulan serta pembunuhan yang terjadi kepada para perempuan di Turki. Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi karena kebanyakan para suami tidak senang jika istri mereka juga berkerja di luar rumah. Politik Islamisme yang Erdogan terapkan seperti menjadi keuntungan sendiri bagi para penganut konservatif. Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan bahwa agama, ideologi dan bahasa menjadi pendorong terjadinya kekerasan kultural kepada perempuan Turki.

BAB IV

PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan

Tindakan kekerasan kepada perempuan Turki sudah terjadi sejak dari masa kemasa kepemimpinan para presiden Turki sebelumnya. Kekerasan terhadap perempuan ini terjadi dengan cara yang juga berbeda-beda. Kekerasan terhadap perempuan di Turki masih terjadi sampai pada kepemimpinan Erdogan sebagai Presiden Turki masa kini. Kekerasan yang terjadi merupakan kekerasan yang dimana bersifat kultural. Hal ini menyebabkan bentuk kekerasan ini tidak hanya berdampak pada psikologis, tetapi juga akhirnya berdampak pada fisik perempuan Turki. Dalam kekerasan terhadap perempuan Turki ini seperti menjadi sebuah isu yang akan terus terjadi di setiap periode pemerintahan di Turki. Pada bab II penulis menuliskan data perbandingan posisi perempuan di masa sekuler Ataturk dan masa Islamisme Erdogan hingga memicu akan terjadinya kekerasan kultural pada perempuan Turki. Kekerasan kultural ini menjadi penghalang bagi perempuan dalam mendapatkan hak-hak yang mereka inginkan. Kemajuan hak pada perempuan bisa terlihat di masa sekuler kepemimpinan Ataturk, dimana perempuan diberikan hak yang sama dengan yang dimiliki oleh laki-laki. Namun bisa di lihat pada masa Erdogan dimana adanya tuntutan agar perempuan bisa bersikap lebih halus, islamiyah dan juga tradisional agar bisa dikatakan sebagai wujud sejati menjadi sosok seorang ibu. Di lain hal dalam masa kepemimpinan Erdogan, perempuan juga tidak mendapatkan kesetaraan yang sama dengan yang didapatkan oleh laki-laki, karena kedudukan perempuan dan laki-laki di dalam islam adalah berbeda. Perempuan memiliki peran yaitu harus menjadi sosok ibu yang baik dan tradisional. Perempuan dikesampingkan ke dalam peran yang periferal sehingga banyak terjadinya protes dan demo yang dilakukan oleh aktivis maupun pro gerakan perempuan agar dikembalikannya hak-hak perempuan dalam menentukan

pilihan hidup mereka sendiri.

Di dalam bab III penulis menuliskan bagaimana kekerasan kultural ini bisa terjadi pada perempuan Turki disebabkan oleh adanya tiga dorongan, yaitu karena aspek Agama, ideologi dan bahasa. Dimana hal ini pada akhirnya lalu menyebabkan terjadinya kekerasan secara struktural dan langsung yang diterima oleh perempuan Turki hingga memakan korban yang cukup banyak, baik korban kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan. Dalam penelitian ini di temukan bahwa faktor agama, ideologi dan bahasa menjadi argumentasi penulis bagaimana kekerasan kultural ini bisa terjadi terhadap perempuan di Turki. Hal ini berhasil penulis buktikan dengan bagaimana aturan yang dibuat oleh Erdogan berkiblat pada unsur agamis yang melarang dilakukannya aborsi, memiliki anak lebih banyak, tidak menjadi perempuan karier serta aturan nya terkait mentradisionalkan para perempuan Turki agar bisa menjadi sosok Ibu seperti di dalam Islam yang mana memiliki banyak anak dan patuh terhadap suami. Hal ini mengakibatkan banyaknya perempuan Turki yang tidak bekerja dan juga maraknya kekerasan yang mereka terima oleh partner mereka. Oleh sebab itu, fenomena kekerasan kultural kepada perempuan ini akan terus berlanjut dan sulit untuk ditangani oleh setiap periode pemerintahan Turki. Hukum-hukum Islam yang Erdogan gunakan semakin memperkuat hal tersebut dengan memberikan pandangan jika perempuan adalah sebagai masyarakat kelas dua yang mana hak-hak nya bukanlah menjadi prioritas utama selagi dia bisa menjadi sosok ibu rumah tangga dan istri yang baik bagi suaminya. Hal ini sangat bertentangan dengan kebebasan yang Galtung sebutkan, karena dalam mendapatkan kebebasan itu sendiri seorang individu berhak menentukan jalan kehidupan yang ia inginkan di dalam dirinya tanpa adanya larangan dan aturan yang membatasinya. Perempuan Turki harusnya dapat menentukan jalan hidup mereka sendiri tanpa aturan yang Erdogan buat agar perempuan harus lebih halus dan tradisional.

4.2 Saran Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, penulis berhasil menjawab rumusan masalah penelitian mengapa kekerasan kultural bisa terjadi terhadap perempuan di Turki. Namun, untuk lebih memperbanyak ilmu dan pengetahuan maka penulis mengajukan beberapa hal untuk melengkapi penelitian yang sudah penulis lakukan. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang akan diajukan oleh penulis;

1. Peran kebijakan yang dikeluarkan oleh Erdogan dan pernyataan yang sering diberikan dalam memposisikan perempuan sangat mempengaruhi fenomena kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Turki. Pengkajian lebih lanjut secara mendalam dan teoritis akan sangat menarik untuk dilakukan dalam menjelaskan secara lebih signifikan lagi akan peran tersebut.
2. Bisa dilihat jika kekerasan kultural yang terjadi terhadap perempuan Turki sudah terjadi sejak dulu di dalam setiap periode pemerintahan. Hal ini tentu menarik untuk dianalisis menggunakan metode periodisasi dimana penelitian tersebut akan memberikan gambaran perkembangan kekerasan terhadap perempuan di Turki dalam setiap masa periode pemerintahannya.
3. Dalam konsep segitiga kekerasan terdapat juga kekerasan struktural yang juga berkontribusi dalam terjadinya bentuk kekerasan. Oleh sebab itu pengkajian secara mendalam dan teoritis terhadap konsep ini akan berguna dalam menganalisis lebih dalam sebuah kajian guna menambah pemahaman mengenai kekerasan terhadap perempuan di Turki.

DAFTAR PUSTAKA

Arat, Y. (2000). From Emancipation to Liberation : Changing Role of Women in Turkeys Public Realm. *Journal of International Affairs*, 133.

Arat, Y. (2010). Women's Rights and Islam in Tuekish Politics: Te Civil Code Amendment. *The Middle East Journal Middle East J*, 235-51.

Aslan, K. (2019). *Erdogan Accuses Wmen's March of Disrespencting Islam.* Istanbul: REUTERS.

Barry, I. Y. (2017). The Decline and Resurgence of Turkish Islamism : The Story of Tayyip Erdogan's AKP. *Journal of Citizenship and Globalisation Studies*.

Bahri, S. (2017). Pemikiran Politik Recep Tayyip erdogan (Studi terhadap Pergulatan Politik Sekuler Versus Islam dalam Revolusi Turki). 343-354.

Barry, I. Y. (2017). The Decline and Resurgence of Turkish Islamism : The Story of Tayyip Erdogan's AKP. *Journal of Citizenship and Globalisation Studies*.

Bruton, F. B. (2016). *Turkey's President Erdogan Calls Women Who Work "Half Persons".* nbcnews.com.

Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 30-31.

Eski, B. (2020). *Turkey femicides are rising with Erdogan poised to make the violence worse.* Istanbul: nbcnews.

Febriannisa, N. R. (2019). *Kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan di Negara Turki*.

Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 291-305.

Galtung, J. (1969). Violence, Peace and Research. *Journal of Peace Research,*

167-191.

Galtung, J. (1996) *Peace by Peacful Means: Peace and Conflict Development and Civilization.* Olso: International Peace Researh Institute.

Gulel, D. (2020). Patterns of Misogyny in Turkey's Contemporary Political Discourse : An Analysis of the Presidential Speeches. 11-13.

Leake, A. (2012). A Brief History of Feminist Movements in Turkey. *E-International Relations*.

Letsch, C. (2020, 03 Sunday). Violence against women, Turkey's new normal. *Communication between women's advocacy and civil society groups and the AKP government has all but ceased.*

Letsch, C. (2020). *Violence against women, Turkey's new normal.* Istanbul: The Arab Weekly.

Negron-Gonzales, M. (2016). The Feminist movement during the AKP era in Turkey: Challenges and opportunities.

Tunçel, R. B. (2019). From progress to backlash : Turkey's transition from democracy to authoritarianism challenges the feminist movement.

NEWS, B. (2014). *Turkey president Erdogan: Women are not equal to men.* BBC NEWS.

Reuters. (2017). *Turkish women march against rising intolerance in Istanbul.* Istanbul: Hurriyet Daily News.

Sabah, D. (2019). TurkStat survey : Gender pay gap remains in place.

Sebnem, C. (2016). An Example for the Construction of Masculinity in Turkey : The Women Has No Name. 62-63.

Sevig, Y. (2015). The Participation of Women in Economics, Professional and Social Life in Turkey. 129-130.

Shackell, J. (2018). *Meet three Women working to close Turkey's gender pay gap.* The Journal by Intrepid Travel.

Timeline. (2012). *A History of Turkish Coups.* Al Jazeera.

Timeline. (2020). *Turkey's long history of femicides.* Istanbul: dw.com.

Tunçel, R. B. (2019). From progress to backlash : Turkey's transition from democracy to authoritarianism challenges the feminist movement.

Wagner, M. M. (2016). The Decline of Women's Rights in Turkey: Is it political Islam or Tayyip?

(2020). we will stop femicide platforms.

Wagner, M. M. (2016). *The Decline of Women's Right in Turkey: Is it Political Islam or Tayyip?*, 4-5.

Wagner, M. M. (2016). The Decline of Women's Rights in Turkey: Is it Political Islam or Tayyip. 50-51.

Wagner, M. M. (2016). The Decline of Women's Rights in Turkey: Is it political Islam or Tayyip?

WOMEN, U. (2015 - 2016). *Global Database on Violence against Women.* un women-database.

Women Economic Forum. (2018). *The Global Gender Gap Report. Geneva:* World Economic Forum.

YaleGlobal. (2019). *Women's Struggle in Turkey.* Yale University.